

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan Islam dan negara Indonesia menurut salah satu tokoh pembaharuan Islam atau juga sering dikenal dengan guru Persatuan Islam (PERSIS) yaitu Ahmad Hassan (1887-1958). Banyak orang mengenalnya sebagai seorang ulama dikarenakan tulisan-tulisannya banyak memuat tentang persoalan-persoalan agama, selain itu ia dikenal sebagai ulama yang pandai berdebat. Keyakinan dasar pemikiran Ahmad Hassan tentang agama yang berpatokan kepada Alqur'an dan Sunnah membuatnya berani dalam berdebat menghadapi siapapun.

Tidak dapat dipungkiri hubungan antara agama dan negara sudah sejak dulu hingga sekarang terus menjadi perdebatan antara ahli pemikir politik Islam maupun Barat. Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara juga terjadi di Indonesia, ketika itu di Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok yang mana satu kelompok mewakili aspirasi umat Islam yang sering juga disebut dengan kelompok nasionalis Islamis dan di sisi lain ada kelompok nasionalis sekular atau juga kelompok netral agama.¹

Kelompok Islam menginginkan dasar negara Indonesia berdasarkan syariat Islam dikarenakan Islam memiliki andil besar dalam pergerakan kemerdekaan, sedangkan kelompok nasionalis memperjuangkan demi kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama sehingga jika hanya Islam yang

¹ Rusli Kustiman Iskandar, "Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno dan Mohammad Natsir," *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XIX, No. 02, April-Juni 2003, h. 208.

dijadikan dasar negara bagaimana agama yang lainnya yang juga ikut berjuang, dan mereka akan memisahkan diri dari Indonesia.

Perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok-kelompok tersebut belum ada titik temunya, sehingga untuk mencapai kata mufakat terbentuklah panitia sembilan. Kelompok nasionalis Islamis diwakili oleh Haji Agus Salim (1884-1954), Kyai Wahid Hasjim (1914-1953), Abikusno (1897-1968) dan Abdul Kahar Muzakkir (1908-1973). Sementara itu, kelompok nasionalis sekular yaitu, Soekarno (1901-1970), Mohammad Hatta (1902-1980), A.A. Maramis (1897-1977), Achmad Subardjo (1896-1978) dan Muhammad Yamin (1903-1962).

Perdebatan mengenai dasar negara memang merupakan bagian dari sejarah Indonesia sebelum merdeka, perubahan sila pertama mungkin hingga saat ini masih begitu kuat dalam ingatan kita. Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945 yang mana isinya pada sila pertama menyatakan, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akhirnya, pada 18 Agustus pagi demi kesatuan dan menjaga persatuan nasional, serta ancaman dari daerah di Indonesia yang ingin melepaskan diri jika Indonesia hanya berdasarkan Islam. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Soekarno dan Hatta kepada Ki Bagus Hadikusumo (1890-1954), Kasman Singodimedjo (1904-1982), dan Teuku Muhammad Hasan (1906-1997), pada akhirnya mereka rela melepaskan tuntutan mereka.² Berdasarkan alasan di atas sila pertama Indonesia

² Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), h. 60-63.

diperbaiki menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa,” yang intinya untuk mewakili seluruh masyarakat beragama di Indonesia.

Setidaknya hingga saat ini terdapat tiga pandangan besar di dunia ini terkait hubungan agama dan negara. *Pertama*, aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah sebuah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. *Kedua*, aliran kedua berpendapat bahwa Islam agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wassalam* bukanlah seorang kepala negara melainkan hanya utusan Allah *Subhanahu wa ta’ala*. *Ketiga*, aliran ini berpendapat bahwa mereka menolak Islam sebagai agama yang lengkap. Namun, mereka juga menolak jika Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan, aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.³

Soekarno yang mewakili kaum nasionalis memiliki pandangan untuk membangun kerangka negara Indonesia yang moderen mengambil contoh dari negara Turki Sekular di bawah Kemal Attatruk (1881-1938), menurut Bung Karno masalah agama adalah masalah Individu, sedangkan tokoh-tokoh Islam melihat bahwa hukum-hukum dan syariat Islam mampu mengatur negara dan individu di dalamnya, mereka diantaranya Mohammad Natsir (1908-1993), Haji Agus Salim dan Ahmad Hassan.

Ahmad Hassan mengingatkan agar nasionalisme tidak menjurus ke arah *‘ashabiyyah*, yakni *spirit of the clan*. Ahmad Hassan menginginkan perlunya

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1.

semangat universal melampaui kesetiaan pada bangsa seperti yang diajarkan Islam.⁴ ‘*Aṣābiyyat* (perasaan satu kelompok, atau kekuatan kelompok dan atau solidaritas sosial), menurut Ibn Khaldun (1332-1406), timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. ‘*Aṣābiyyat* yang dimaksud adalah rasa cinta setiap orang pada nasabnya, golongannya serta terhadap keluarga dan kerabatnya.⁵

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. *Pertama*, untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan keteguhan pemikiran Ahmad Hassan mengenai konsep negara Indonesia yang berdasarkan Islam. *Kedua*, banyak yang mengetahui bahwa Ahmad Hassan hanya seorang tokoh ulama Fiqih dan Hadits. Namun, sebenarnya ia juga memiliki tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan politik yang masih jarang sekali diungkapkan. *Misalnya*, *A.B.C Politik, Islam dan Kebangsaan*, serta *Kedaulatan*. *Ketiga*, karena banyaknya perdebatan yang tidak berkesudahan dari dulu hingga sekarang mengenai hubungan agama dan negara sering kali membuat bingung, bagaimana seharusnya Islam dalam sebuah negara, apakah antara agama dan negara dipisah atautkah keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)”**.

⁴ Lukman Hakiem, *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, (Jakarta: Republika, 2008), h. 48-49, 131-133.

⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 275-276.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peta ideologi politik di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan?
2. Bagaimana biografi intelektual Ahmad Hassan?
3. Bagaimana pemikiran Ahmad Hassan terkait hubungan Islam dan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui peta ideologi politik di Indonesia yang terjadi rentan waktu menjelang kemerdekaan dan dampaknya terhadap pemikiran Ahmad Hassan.
- b. Untuk mengetahui biografi intelektual kehidupan Ahmad Hassan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana gagasan pemikiran Ahmad Hassan terkait hubungan Islam dan negara di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan pandangan baru dalam melihat hubungan Islam dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia. Pandangan Ahmad Hassan tidak

lepas dari pengaruh ideologi-ideologi besar yang ada di Indonesia saat itu. Ideologi tersebut antara lain, Islam, Nasionalis dan Komunis.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kajian Politik Islam khususnya terkait hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai hubungan Islam dan negara sebenarnya sudah banyak dikaji sebelumnya, akan tetapi terkait pemikiran Ahmad Hassan tentang hubungan Islam dan negara masih sulit ditemukan. Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai relevan terhadap penelitian ini.

Pertama, buku Howard M. Federspiel, yang telah dicetak ulang dalam bahasa Indonesia dengan judul *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Federspiel menjelaskan mengenai keyakinan dasar Ahmad Hassan tentang kewajiban seorang muslim dan sifat Tuhan.⁶

Lebih lanjut ia banyak menerangkan organisasi Persis secara garis besar dari pada berfokus ke tokoh Ahmad Hassan. Seperti pandangan Persis terhadap negara sekular, pada bagian ini disinggung sedikit mengenai pendapat Ahmad Hassan yang mengomentari pendapat Soekarno yang condong untuk menjadikan Indonesia seperti Turki dan Persia. Ahmad Hassan tidak setuju dengan hal

⁶ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Persatuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Aswin dan Affandi Mochtar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. ix-1.

tersebut karena di negara sekular banyak perjudian, pelacuran, dan dosa-dosa besar lainnya, hingga hal-hal lain yang tidak di perkenankan.

Kedua, buku Syafiq A. Mughni berjudul *Hassan Bandung : Pemikiran Islam Radikal*. Karyanya tersebut menjelaskan riwayat hidup Ahmad Hassan dan beberapa pemikirannya tentang agama. Selanjutnya memaparkan beberapa organisasi yang ada di Indonesia saat itu. Misalnya, Persatuan Islam, Mayumi, Nahdatul Ulama mengenai negara Islam, sekularisme, sikap politik terhadap umat lain agama, serta fungsi ulama. Hanya sedikit yang menyinggung pendapat Ahmad Hassan tentang politik apalagi tentang yang lebih spesifik terkait hubungan Islam dan negara.⁷

Ketiga, buku Akh. Minhaji yang berjudul *A. Hassan Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia*. Akh. Minhaji di dalam bukunya berbicara seputar biografi Ahmad Hassan yang mencakup riwayat hidup, karya, serta tulisan-tulisan Ahmad Hassan. Kemudian mengenai Ushul Fiqih, sumber-sumber hukum Islam, serta tentang pembahasan yang berkaitan mengenai agama lainnya. Akh. Minhaji juga menjelaskan dampak pemikiran Ahmad Hassan terhadap murid-muridnya seperti Mohammad Natsir, Muhammad Isa Anshary, Usman El-Muhammady dan Abdulkadir Hassan. Sementara itu mengenai Islam dan negara tidak ditemukan penjelasan secara rinci.⁸

Keempat, buku Tamar Djaja dengan judul *Riwayat Hidup A. Hassan*. Hampir keseluruhan isi buku ini memuat riwayat hidup Ahmad Hassan ketika di

⁷ Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikiran Islam Radikal*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. v.

⁸ Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih di Inodonesia 1887-1958*, (Garut: Pembela Islam Media, 2015), h. v-vi.

Singapura serta di Indonesia. Selanjutnya beberapa pandangan beberapa tokoh mengenai Ahmad Hassan misalnya, Deliar Noer, Cis Attamini, Fuad Mohd. Fachruddin dan lain sebagainya. Tamar Djaja juga menjelaskan beberapa debat Ahmad Hassan dengan tokoh-tokoh yang tidak memiliki paham yang sama dengannya. Seperti, A. Ayyub Ahmadiyah Qadian dan Muhammad Akhsan yang merupakan seorang Atheis.⁹

Terkait pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Hassan masih sulit ditemukan akan tetapi mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia menurut tokoh-tokoh lainya sudah cukup banyak. Misalnya, Muhammad Hari Zamharir di dalam bukunya *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa negara dan Islam yang digabungkan menjadi negara Islam merupakan suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama, karena negara adalah salah satu kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya spiritual dan pribadi. Namun, antara agama dan negara bukan berarti dipisahkan.¹⁰

Dalam buku Abdul Azis Thaba, dengan judul *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Ia menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang *qat'i* dan *zhanni* yang memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Selama ini, teori negara Islam bisa muncul dari teori khilafah, imamah dan imarah. Namun, perlu dipertegas bahwa Alqur'an dan Sunnah Rasulullah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam bukunya ia

⁹ Tamar Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan*, (Jakarta: Mutiara, 1980), h. 3-4.

¹⁰ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 117, 313.

meminjam pendapat Dr. Abdel Wahab yang mengatakan bahwa konsep negara Islam harus ditinggalkan sama sekali.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Untuk membaca arah pemikiran Ahmad Hassan mengenai Islam dan negara penulis meminjam teori Perspektif Trikotomi oleh Allan Samson, yang ditulis oleh Bahtiar Effendy dalam bukunya Islam dan negara. Perspektif ini melihat hubungan Islam dan negara dapat dikategorikan kedalam tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Fundamentalis*. Kelompok *fundamentalis* mendukung jenis penafsiran atas Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan *sinkretisme* kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Dalam konteks ini yang dimaksud ialah menekankan pentingnya kekuasaan agama atas negara, agama menjadi sebuah keharusan untuk mengatur kehidupan bernegara.¹²

Pendapat di atas sejalan dengan tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran seperti ini diantaranya yaitu, Ibn Abi Rabi' (hidup pada abad IX M), al-Farabi (870-950 M), (975-1059 M), hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M). al-Mawardi

¹¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 41-42.

¹² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 42-43.

misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelolah kebutuhan diniawiyah masyarakat.¹³

- b. *Reformis*. Secara teoritis kelompok ini juga menekankan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekular atas landasan yang sama-sama disepakati dibandingkan dengan kelompok *fundamentalis*. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era moderen.¹⁴

Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk urusan politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim yang melihat Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan prefensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di antara pemikir-pemikirnya ialah Muhammad Husein Haikal (1886-1956), Muhammad Abduh (1862-1905), dan di Indonesia Nurholish Madjid (1939-2005). Muhammad Abduh misalnya berpendapat bahwa Islam bukanlah agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur antara sesama muslim dan sesama manusia lainnya yang untuk berlakunya dibutuhkan penguasa atau negara.

¹³ Sukron Kamil, *Pemikir Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalsme, dan Antikorupsi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 3-4.

¹⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 42-43.

c. *Akomodasionis*. Kelompok ini memberikan penghargaan tinggi kepada kerangka persatuan Islam, tetapi mereka mempertahankan pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh, mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-kelompok sekular dan bekerjasama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati.¹⁵

Tipologi ini memandang Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lain dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara. Negara berkaitan dengan urusan duniawi yang pertimbangannya adalah akal dan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi semata. Negara tidak diatur oleh agama begitupun sebaliknya. Negara juga tidak boleh mengintervensi urusan agama, karena agama adalah urusan pribadi dan keluarga.

Pemikir yang termasuk kedalam tipologi ini ialah Ali Abd al-Raziq (1886-1966), A. Luthfi Sayyid (1872-1963), dan di Indonesia Soekarno (1901-1970). A. Luthfi Sayyid misalnya berpendapat bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dalam membangun negara, kaum muslimin tidak harus mengikatkan diri pada Islam dan pan-Islamisme karenanya tidak relevan lagi.¹⁶

¹⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 42-43.

¹⁶ Sukron Kamil, *Pemikir Politik Islam Tematik*, h. 26-27.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang di mana memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian, baik itu berupa buku, tulisan-tulisan lainnya yang di nilai dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat objek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau *historical research*. *Historical research* adalah sebuah pendekatan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat membantu melangkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama yang tujuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang di teliti. Buku-buku tersebut, antara lain, sebagai berikut:

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009), h. 1.

¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), h. 8.

1. *Risalah Politik A. Hassan*. Di dalamnya memuat beberapa judul besar karya Ahmad Hassan yaitu, *A.B.C politik, Islam dan Kebangsaan, Kedaulatan, Kunci Tarikh Islam*. Keempat karyanya tersebut dikumpulkan oleh Tiar Anwar Bachtiar di dalam buku *Risalah Politik A. Hassan* tersebut.
2. *Riwayat Hidup A. Hassan*. Sebuah buku yang ditulis oleh Tamar Djaja dan diterbitkan oleh Mutiara Jakarta pada tahun 1980.
3. *Kitab At-Tauhied*. Kitab ini ditulis langsung oleh Ahmad Hassan dan diterbitkan pada tahun 1950 di Bangil (Pasuruan) cetakan 4.
4. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Jilid I, 2, 3, dan 4* karya Ahmad Hassan, diterbitkan Diponegoro Bandung cetakan ke 15.
5. *Dibawah Bendera Revolusi karya Soekarno*, cetakan ke 5 diterbitkan di Jakarta tahun 2005. Buku ini memuat surat menyurat antara Soekarno dan Ahmad Hassan ketika Soekarno diasingkan di Ende (Flores).

Beberapa buku yang telah disebutkan di atas merupakan koleksi pribadi penulis dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Sementara itu, beberapa buku tambahan yang ditemukan di perpustakaan yang juga karya Ahmad Hassan antara lain yaitu: *Kesopanan Tinggi karya, Pengajaran Sholat* dan lain sebagainya.

- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai penunjang kebutuhan data primer, yang relevan dan ilmiah seperti dari buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Misalnya, *A. Hassan Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia 1887-1958* karya Akh. Minhaji. Buku ini merupakan cetakan

pertama dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Imam Sopyan dan diterbitkan pada tahun 2015 di Garut.

Selanjutnya *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal* karya Syafiq A. Mughni, diterbitkan pada tahun 1980 di Surabaya. Serta buku *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* karya Howard M. Federspiel, buku yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar dan dicetak pada tahun 1996 di Gadjah Mada University Press.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Dalam mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) yakni proses pengindefikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁰

Teknik ini digunakan untuk menelusuri data historis, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada di

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 62.

²⁰ Consuelo G Sevilla, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993),

perpustakaan, baik berupa arsip, buku, dokumen, majalah, jurnal, tesis, disertasi dan lain-lain.²¹ Proses ini dilakukan dengan cara menelaah hasil temuan yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk dokumen maupun tulisan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap pencapaian hasil temuannya. Oleh karena itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan beberapa metode analisa data, tujuannya agar dapat mempermudah memaparkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh agar memperoleh hasil penelitian yang optimal.

a. Interpretasi

Interpretasi yang dimaksudkan di sini ialah upaya untuk tercapainya pemahaman yang benar terhadap data, fakta dan gejala, dengan menggabungkan semua hasil dari analisis yang telah dilakukan. Interpretasi dilakukan agar tercapainya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, sehingga tercapainya hasil yang diinginkan.

b. Deduksi

Suatu cara berfikir yang bertolak dari asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna khusus. Dengan cara ini bermaksud menerangkan beberapa data yang masih bersifat umum dari pemikiran Ahmad Hassan, yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk yang

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 121.

lebih khusus, sehingga dapat berfokus tentang pemikirannya mengenai hubungan agama dan negara.

c. *Koherensi Intern*

Agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka konsep pemikirannya dilihat menurut keselarasannya antara satu dengan yang lain. Untuk mempermudah menetapkan pokok utama pemikirannya yang paling mendasar atau sentral.

d. *Kesinambungan Historis*

Cara untuk menghubungkan pemikiran-pemikirannya terhadap sejarah hidupnya, seperti lingkungan historis, dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri.²²

²² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2014), h.57.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dibagi kedalam lima bab, dengan tujuan untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini nantinya, oleh sebab itulah penulis akan menguraikannya secara sistematis.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang peta ideologi politik di Indonesia, a) Sejarah munculnya ideologi politik di Indonesia. b) Perjuangan Ahmad Hassan dalam Peta Ideologi Politik Indonesia. Pada bab ini berusaha menjelaskan posisi pemikiran politik Ahmad Hassan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950 an.

Bab ketiga, membahas tentang biografi intelektual Ahmad Hassan. Biografi intelektual ini digunakan untuk mengetahui latar belakang yang membentuk pemikiran Ahmad Hassan. Di dalam bab ini memuat, a) Latar belakang keluarga, b) Latar belakang pendidikan, c) Aktivitas sosial politik Ahmad Hassan dan d) Karya-karya Ahmad Hassan.

Bab keempat, membahas bagaimana pemikiran Ahmad Hassan terkait hubungan Islam dan negara. Pada bab ini merupakan bagian yang paling penting karena merupakan inti dari topik atau judul yang diambil dalam penelitian ini. Dimana pemikiran Ahmad Hassan yang dimuat pada bagian ini merupakan hasil dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Ahmad Hassan. Di

dalamnya terdiri dari, a) Negara menurut Ahmad Hassan dan b) Hubungan Islam dan negara itu sendiri.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan hasil dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan diambil melalui serangkaian pemahaman yang saling keterkaitan antara masing-masing pembahasan di dalam penelitian ini. Pada bagian penutup ini juga di muat kritik dan saran yang disajikan oleh penulis terhadap persoalan-persolan yang telah dikaji di dalam penelitian ini.